

WHAT IS POLICY?

UTAMI DEWI

IAN UNY 2013 Week 1

Utami.dewi@uny.ac.id

A. Kebijakan sebagai Keputusan (pilihan)

1. Menurut Thomas R Dye
“ Public policy is whatever governments choose to do or not to do”

Definisi ini memiliki 2 makna:

- a. Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan swasta
- b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

2. Menurut Philip J Cooper

Kebijakan publik merupakan pilihan otoritatif yang dibuat demi kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik merupakan suatu jawaban, tetapi bukan jawaban satu-satunya, terhadap suatu persoalan publik yang dilengkapi dengan satu atau beberapa perangkat kebijakan (policy tools) seperti perangkat hukum, regulasi, sistem insentif, penyebaran informasi, evaluasi, dll

3. Menurut James Anderson

“ Public policies are those policies developed by governmental bodies and official”. Kebijakan merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah.

Implikasinya:

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu
- b. Kebijakan berisi pola tindakan pejabat pemerintah
- c. Kebijakan itu adalah apa yang benar2 dilakukan oleh pemerintah

4. Menurut William N. Dunn

Public policy adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma2 yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan2 pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya.

Kebijakan sebagai proses manajemen

1. Menurut Ripley

Kebijakan publik merupakan suatu proses dimana dalam proses tersebut terdapat suatu model sederhana untuk memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya.

2. Menurut William Jenkin

“Public policy is a set of interrelated decision taken by a political actor or a group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle, be within the power of those actors to achieve.”

3. Menurut Guy Peters

“ the sum of activities of governments, whether acting directly or through agents, as it has an influence the lives of citizens”

Kebijakan sebagai Intervensi pemerintah

1. Menurut Carl Friedrich kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

2. Menurut Chandler dan Plano

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Jenis-Jenis Kebijakan publik

James Anderson membagi kebijakan publik dalam:

1. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural
2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatory vs kebijakan redistributif
3. Kebijakan material vs kebijakan simbolis
4. Kebijakan public goods vs privat goods

Kebijakan Substantif vs Prosedural

- Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, ex: kebijakan subsidi BBM, raskin
- Kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Ex: kebijakan ttg kriteria miskin, bgm prosedur memperoleh raskin

Kebijakan distributif vs regulatori vs redistributif

- Kebijakan distributif → distribusi pelayanan atau kebermanfaatan pada masy/ kelompok masy.
- Kebijakan regulatori → berupa pembatasan atau pelarangan perilaku individu
- Kebijakan redistributif → mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dlm masy.

Kebijakan material vs kebijakan simbolis

- Kebijakan material → kebijakan yang memberi keuntungan sumberdaya konkrit pada kelompok sasaran
- Kebijakan simbolis → kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran

Kebijakan berkaitan barang umum vs barang privat

- Kebijakan *public good* → berkaitan dengan pemberian barang atau pelayanan publik
- Kebijakan *privat good* → mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.